

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas sering kali mengalami masalah diskriminasi di masyarakat luas. Marjinalisasi terhadap penyandang disabilitas telah mengakar kuat dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi penyandang disabilitas. Ditambahnya dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 3,5 juta lebih (WHO 2011). Di negara yang berasaskan demokrasi seperti ini hak seorang warga adalah harga mati yang harus dipenuhi oleh pemerintahan, semua warga yang dimaksud adalah seluruh warga negara tanpa adanya pengkategorian kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi tindak diskriminasi ataupun masalah-masalah bagi penyandang disabilitas yang merupakan warga Negara yang sah masihlah sering terjadi. Masalah-masalah tersebut seringkali berakibat pada tataran diskriminasi akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Indonesia yang merupakan Negara demokrasi yang menggunakan pemilu sebagai cara untuk menentukan pemimpin masih jauh dari kata adil. Banyaknya diskriminasi yang terjadi pada kelompok-kelompok tertentu termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas adalah contoh dari ketidakadilan tersebut. Layaknya pelayanan publik dalam kehidupan sehari-hari, aksesibilitas dalam pemilu

seperti pelayanan saat memilih ataupun fasilitas untuk mengakses pemilu juga dibutuhkan penyandang disabilitas, baik akses secara fisik(transport/jarak, pelayanan saat memilih) ataupun akses secara informasi(visi-misi paslon/biografi paslon). Yang terjadi dalam proses pemilu beberapa tahun belakangan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam pemilu masih sering terjadi. Berbicara tentang informasi dalam pemilu, informasi terkait paslon menjadi sangat penting agar memudahkan dalam proses menentukan pemimpin nantinya.

Setiap penyandang disabilitas memiliki masalah yang berbeda-beda dalam mengakses informasi tersebut, terutama penyandang disabilitas netra yang memiliki masalah dalam visualisasi pengelihatan, Sedangkan informasi terkait paslon sejauh ini masih berfokus dalam visualisai pengelihatan, seperti spanduk-spanduk maupun brosur-brosur yang masih jauh untuk bisa dimengerti oleh penyandang disabilitas netra. Dalam hal ini penyandang disabilitas netra mengalami tindak diskriminasi yang cukup serius dalam pemilu, sedangkan mereka memiliki kesamaan hak yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Padahal jika dilihat pada UU No 8 tahun 2016 pasal 77 disebutkan salah satunya bahwa pemerintah wajib menjamin penyandang disabilitas mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Dapat disimpulkan bahkan dalam peraturan undang-

undang, informasi menjadi salah satu aspek penting yang wajib didapatkan seseorang lebih khususnya penyandang disabilitas dalam penelitian ini.

Dari temuan *The Asia Foundation* sekitar 68,1% penyandang disabilitas di Indonesia mengatakan bahwa mereka setuju dengan adanya sistem demokrasi, lalu 22,22% menyatakan sangat setuju dengan demokrasi dan sisanya 9,7% menyatakan tidak tahu. Dari data tersebut terbilang penyandang disabilitas netra masih memiliki kepercayaan dalam sistem demokrasi. Lalu temuan *the asia foundation* menyatakan 38.24% penyandang disabilitas menilai sangat penting adanya sebuah pemilu, 41.18 % mengatakan penting, 5.88% mengatakan tidak penting, 2.94 sangat tidak penting dan sisanya 11.76 % tidak tahu, hal tersebut merupakan bukti bahwa penyandang disabilitas masih membutuhkan pemilu sebagai penyalur aspirasi mereka. Pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas dalam menangani masalah diskriminasi yang cukup lama terjadi ini. Sehingga nanti tidak ada hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi dalam pemilu, khususnya bagi penyandang disabilitas netra yang mengalami masalah cukup serius dalam pemilu.

Disabilitas Netra sendiri merupakan sebutan bagi orang-orang yang mengalami ketidak fungsian pada organ tubuh pengelihatannya. Menurut PERTUNI(2013) ,disabilitas netra adalah sebutan bagi mereka yang tidak memiliki pengelihatannya sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa pengelihatannya tetapi tidak mampu menggunakan pengelihatannya

untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 *point* dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan bantuan kaca mata. Dengan kondisi semacam itu, tuna netra merupakan salah satu dari penyandang disabilitas lainnya. Sama halnya dengan kondisi penyandang disabilitas lainnya, disabilitas netra juga seringkali mengalami kesulitan untuk bersosialisasi maupun beradaptasi dengan keadaan di sekelilingnya.

Hal ini terjadi karena masyarakat di sekitar mereka seringkali menganggap remeh ataupun cenderung tidak menganggap keberadaan para penyandang disabilitas. Selain itu adanya sistem-sistem yang seringkali tidak aksesibel bagi para penyandang disabilitas juga ikut mempengaruhi eksistensi mereka di masyarakat. Berbagai stigma di masyarakat tersebut pada akhirnya mempengaruhi struktur sosial yang ada di masyarakat, untuk selanjutnya menyebabkan berbagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak para penyandang disabilitas. Realitas sosial seperti ini lah yang terus terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan dalam berbaaur dengan masyarakat luas ataupun untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Masalah akses bagi penyandang disabilitas netra memang penting dikaji, terlebih lagi kesulitan yang dialami penyandang disabilitas netra dalam pemilu. Dalam pemilu seringkali hal yang menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra adalah informasi yang mereka butuhkan, informasi yang disebarkan oleh paslon partai selama ini hanya lewat baner, spanduk ataupun brosur. Meskipun

partai politik seringkali melakukan kampanye terbuka akan tetapi tidak semuanya mampu mengakses hal tersebut. Terlebih lagi disabilitas netra dengan masalah yang mereka alami sulit untuk melakukan mobilisasi sehingga mereka kesulitan untuk mengakses kampanye-kampanye yang diadakan paslon partai.

Dari data Departemen Kesehatan pada tahun 2015 penyandang disabilitas netra di Indonesia hampir mencapai 3,6 juta penduduk atau jika dipresentasikan sebanyak 1,6% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak yang tidak bisa dianggap remeh. Berkaitan dengan jumlah penyandang tuna netra yang banyak, di Indonesia muncul lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan para penyandang tuna netra, salah satunya adalah PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia).

PERTUNI adalah sebuah organisasi atau lembaga yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif dimana penyandang tuna netra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan dalam masyarakat. Hampir keseluruhan tujuan PERTUNI adalah memperjuangkan hak-hak para penyandang tuna netra agar mendapat tempat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yang menjadi ketertarikan peneliti adalah tujuan PERTUNI dalam menyamaratakan hak dan juga kewajiban penyandang tuna netra dalam segala bidang termasuk hak-hak politik penyandang tuna netra.

PERTUNI sendiri berafiliasi dengan Dinas Sosial, dan seringkali pula juga bekerjasama dengan KPU setempat untuk mensosialisasikan pemilu. Hal tersebut menandakan bahwa PERTUNI juga memiliki andil dan mampu memberikan manfaat bagi para anggota yang tergabung didalamnya. Anggota yang tergabung dalam PERTUNI saat ini sudah berjumlah 50 anggota yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang.

PERTUNI sendiri menjadi wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk dapat berkembang dan berpartisipasi sebagai masyarakat. Dengan adanya PERTUNI ini disabilitas netra menjadi terkumpul dalam suatu wadah organisasi yang memungkinkan mereka untuk dapat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Lalu melalui PERTUNI ini penyandang disabilitas netra lebih mudah mengakses informasi apapun, seperti halnya program-program dari pemerintah yang terbaru. Hal ini merupakan salah satu fungsi PERTUNI untuk memfasilitasi anggotanya agar dapat bertahan didalam kehidupannya bermasyarakat. Selain itu adanya program pelatihan yang berbasis ekonomi yang tujuannya adalah untuk membangun kemandirian ekonomi anggota yang tergabung di PERTUNI.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi sendiri seringkali diartikan dengan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Rakyat yang dimaksud dalam pemahaman tersebut berarti seluruh

warga Negara Indonesia, dalam hal ini tak terkecuali para penyandang disabilitas. Proses demokrasi yang tercermin di masyarakat terlihat dari diadakannya pemungutan suara guna memilih pemimpin Negara yang dirasa bisa mewakili aspirasi warganya, yang sering disebut dengan Pemilu.

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu upaya mewujudkan proses demokrasi yang utuh. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam tataran kontitusi, bahkan pemilu tidak hanya dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden saja. Namun, juga untuk menunjuk kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam penyempurnaan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Adanya pemilu dalam masyarakat membuat pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia terlihat nyata. Pemilu ini memudahkan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah pembangunan Negara kedepanya, karena penentuannya disepakati dan dikehendaki bersama. Akan tetapi dalam realisasi sistem demokrasi ini para penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna netra sering kali tidak merasakan hasilnya secara maksimal, seperti kurangnya fasilitas ataupun susah akses untuk melakukan proses pemilu bagi para penyandang disabilitas.

Satu hal yang paling penting dan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan pemilu itu sendiri adalah kesadaran politis dari setiap warga negara. Kesadaran

politis menjadi penting karena hal ini menyangkut kesadaran tiap-tiap individu akan pentingnya mengetahui dan mengikuti proses-proses sistem politik yang sedang berjalan. Ketika seorang warga negara memiliki kesadaran politis maka partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat demokrasi akan semakin aktif, salah satunya keaktifannya dalam mengikuti proses pemilu (pemilihan umum). Memang kesadaran politis tidak serta merta muncul dalam setiap diri warga negara, akan tetapi ada proses pengenalan politik itu sendiri yang mampu memunculkan kesadaran politis tiap individu. Proses pengenalan politik ataupun sosialisai politik berlangsung dalam lingkungan setiap idividu, baik dalam keluarga, teman, sekolah maupun lembaga-lembaga disekitar individu tersebut.

Kesadaran politis tidak serta merta dilihat dari besarnya partisipasi seorang warga negara, akan tetapi sebuah kesadaran dapat diketahui dengan menggali pengalaman-pengalaman yang dialami seorang individu. Partisipasi seseorang merupakan wujud dari kesadaran seorang individu dalam proses pembangunan. Cohen dan Uphoff (1997) membagi tingkatan partisipasi seseorang dalam pembangunan kedalam 4 dimensi. Mulai dari tahap seseorang melakukan partisipasi dalam hal perencanaan, kemudian dilanjutkan partisipasi dalam hal implementasi/pelaksanaan, lalu tahap ketiga dimana partisipasi seseorang dalam menerima dan pemanfaatan hasil dari program yang sudah diberikan atau dilaksanakan, dan yang terakhir adalah tahap penilaian atau

evaluasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali kesadaran tuna netra dalam wujud partisipasi mereka dalam proses PILKADA 2015, yaitu pada partisipasi ketika memilih pemimpin. Dimana PILKADA tersebut merupakan tahap partisipasi ketika seorang penyandang tuna netra ikut merumuskan atau merencanakan pemimpin yang akan membawa kehidupan mereka lebih baik lagi. Penelitian ini berusaha menggali pengalaman dari setiap penyandang tuna netra yang tergabung di PERTUNI tentang politik, yang tujuan dari penggalian pengalaman ini adalah untuk mengetahui kesadaran politis, dan dari kesadaran politis tersebut bisa dimengerti maksud dari partisipasi yang dilakukan penyandang tuna netra dalam pemilu. Dalam hal ini pengetahuan informan tentang pemilu selama ini menjadi penting dalam penelitian ini.

Memang tak dapat dipungkiri kalau sebagian besar dari penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas netra memiliki kekurangan yang menyulitkannya dalam mengikuti proses-proses demokrasi. Sehingga dampak dari adanya sistem demokrasi ini kurang dirasakan secara maksimal oleh mereka yang biasanya tercermin dari penyediaan pelayanan terhadap hak-hak politik warga Negara Indonesia yang difabel selama ini. Hal tersebut berimbas pada semakin sulitnya kehidupan seorang warga Negara difabel dalam menjalani hak dan kewajibannya. Meskipun begitu, beberapa program juga telah diupayakan oleh pemerintah dalam menjamin hak-hak para penyandang disabilitas dengan terus menerus meningkatkan pelayanan yang bermutu dalam

proses demokrasi atau lebih tepatnya dalam pemilu yang diadakan tiap tahunnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah seperti memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam tiap-tiap TPU dalam pemilu memang sudah diupayakan, akan tetapi beberapa kasus penyediaan pendamping yang bersifat netral bagi penyandang disabilitas masih kurang. Padahal seorang pendamping yang netral bagi penyandang disabilitas sangatlah perlu mengingat beberapa penyandang disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam mengikuti proses pemilu. Selain itu adanya diskriminasi dalam hal informasi menjadi masalah yang sangat fatal bagi penyandang tuna netra. Penyandang tuna netra yang memiliki kekurangan dalam hal visualisasi pengelihan sering kali kesusahan mengakses informasi yang beredar terkait pasangan calon¹. Informasi terkait pasangan calon mulai dari informasi biografi dan visi misi dari calon seringkali terangkum dalam selebaran ataupun banner-baner yang dipajang dipinggiran jalan yang hampir semuanya bersifat visualisasi secara pengelihan. Tentunya hal ini secara tidak disadari menjadi sebuah tindakan yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas netra.

Terciptanya demokrasi yang adil yang mampu mengakomodir hak-hak warga negaranya, juga tidak dapat dilepaskan dari kesadaran para pelaku demokrasi tersebut, khususnya dalam hal ini adalah para penyandang

¹ "Minim Sosialisasi Pilpres Untuk Tunanetra," Sinar Harapan, 2014, diakses pada 03 januari 2018, <http://sinarharapan.co/news/read/140704345/minim-sosialisasi-pilpres-untuk-tunanetra-nbsp>

disabilitas. Berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran para penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tuna netra juga dilakukan oleh PERTUNI. Peran-peran pemerintah juga harus diimbangi dengan kesadaran para penyandang tuna netra dalam menyuarakan aspirasinya di pemilihan umum. Hal tersebut salah satunya terwujud dari partisipasi para penyandang tuna netra dalam mengikuti pemilihan umum. Kondisi semacam itu, yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kesadaran politis para penyandang tuna netra dalam memandang suatu demokrasi.

Dari data yang dihimpun oleh peneliti menyebutkan bahwa jumlah DPT(daftar pemilih tetap) dalam pilkada di Kabupaten Malang ada sekitar 76 orang penyandang tuna netra yang terdaftar. Sedangkan anggota PERTUNI Kabupaten Malang sendiri beranggotakan 50 orang yang seluruhnya sudah berusia diatas 17 tahun dan sudah termasuk dalam kriteria yang wajib memilih. Dapat disimpulkan dari temuan ini bahwa ada kemungkinan besar dari jumlah DPT penyandang tuna netra di Kabupaten Malang yang terdaftar oleh KPU sebagian besar adalah anggota PERTUNI. Selain itu PILKADA 2015 menjadi penting bagi penyandang disabilitas netra karena pada PILKADA ini, masyarakat kabupaten Malang termasuk disabilitas netra yang ada didalam PERTUNI kabupaten Malang mereka memilih pemimpin mereka yaitu bupati. Tentunya dengan memilih pemimpin di daerah masing-masing, masyarakat dalam hal ini disabilitas netra lebih dekat dengan pemerintahan daerahnya. Bisa

dikatakan bahwa PERTUNI merupakan sarana pemupuk kesadaran politis bagi penyandang tuna netra, dan dalam hubungannya dengan PILKADA 2015 yang bertujuan memilih bupati tentunya kelompok-kelompok seperti PERTUNI akan mendapat kesempatan untuk bisa dekat dengan pemimpin daerahnya. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti “Partisipasi Politik Penyandang Tuna Netra yang Tergabung dalam PERTUNI dalam memilih pemimpin di Pilkada 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas netra yang tergabung dalam PERTUNI Kabupaten Malang dalam memilih pemimpin di Pilkada 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan partisipasi politik penyandang tuna netra yang tergabung dalam Pertuni Kabupaten Malang dalam Pilkada 2015 dengan menggali motif-motif, maksud atau tujuan ataupun harapan yang ada pada partisipasi mereka pada saat memilih pemimpin di Pilkada 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemikiran pada ilmu sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan fenomena Pemilu yang ada di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan isu disabilitas. Sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan akademis yang mampu menambah wawasan dan pengetahuan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, utamanya bagi aparat setempat dalam meningkatkan pelayanan maupun perhatiannya terhadap para penyandang disabilitas. Hal ini dalam rangka menjamin hak-hak politik dari para penyandang disabilitas itu sendiri.